

Judul : Penegakan komisi VI, holding IDSurvey bagian dari transformasi BUMN
Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Penegakan Komisi VI

Holding IDSurvey Bagian Dari Transformasi BUMN

Komisi VI DPR mendukung pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Survei, yaitu PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey). Ini merupakan langkah strategis Pemerintah memperkuat tata kelola BUMN, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan potensi kebocoran.

ANGGOTA Komisi VI DPR Kawendra Lukistian mengatakan, berdirinya IDSurvey sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong transformasi BUMN yang lebih profesional dan berdaya saing. Juga upaya Pemerintah memperbaiki tata kelola perusahaan negara melalui konsolidasi yang lebih efektif.

"Pemerintah ingin mencegah kebocoran dengan cara mendirikan holding (IDSurvey) yang sehat. Jadi efisiensi itu dilakukan dan kebocoran itu dihindarkan," tandas Kawendra di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi VI DPR mengaku baru mengetahui pembentukan

holding IDSurvey pada Juli 2025. Bahkan, keberadaan holding tersebut dinilai belum memberikan dampak yang dirasakan secara nyata di lapangan.

Menurut Kawendra, pembentukan holding survei merupakan bagian dari transformasi BUMN yang bertujuan menciptakan perusahaan negara yang lebih kuat, sehat, dan kompetitif. Konsolidasi tersebut bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga memperkuat entitas yang memiliki peran strategis.

Kawendra menambahkan, keberadaan IDSurvey diharapkan mampu mendukung penguatan tata kelola BUMN sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian



Kawendra Lukistian

mian nasional melalui peningkatan efisiensi dan daya saing. "Rasanya ini sudah langkah yang tepat," puji politisi Gerindra ini.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menambahkan, Pemerintah memberikan mandat besar kepada IDSurvey dalam menjalankan fungsi sertifikasi, verifikasi, dan inspeksi pada sektor-sektor strategis. Utamanya, berkaitan dengan penerimaan negara, keamanan

nasional, hilirisasi industri, hingga penguatan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Herman menyebut sejumlah sektor yang berpotensi diberikan mandat lebih besar kepada IDSurvey. Antara lain, perdagangan, impor, kepabeanan, pengawasan komoditas, keselamatan pelayaran, sertifikasi ekspor, hingga berbagai program strategis nasional.

"Kebijakan yang mewajibkan penggunaan jasa survei BUMN pada sektor tertentu dapat memperkuat pengawasan negara dan meningkatkan kontribusi IDSurvey terhadap perekonomian nasional," harap Herman di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Herman menekankan, pemberian mandat tersebut tidak bertentangan dengan praktik yang berlaku di banyak negara lain. Justru, banyak negara maju mengutamakan instrumen nasional untuk menjaga kepentingan ekonomi dan kedaulatan mereka.

Penguatan peran IDSurvey

melalui kebijakan yang bersifat wajib, kata Herman, juga akan membantu negara mencegah berbagai praktik yang merugikan perekonomian nasional. Seperti *under invoicing* (pelaporan harga lebih rendah) maupun transfer pricing (penetapan harga antar perusahaan terafiliasi), sekaligus memastikan pengawasan terhadap berbagai aktivitas ekonomi strategis.

Peran IDSurvey, tambah dia, tidak hanya sebagai korporasi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengemban tugas negara dalam menjaga berbagai kepentingan nasional, khususnya di tengah semakin terbukanya persaingan global. Bahkan, peluang bisnis IDSurvey masih sangat besar.

"Pangsa pasar holding BUMN survei saat ini baru mencapai sekitar 27 persen, sementara sebagian besar pasar masih dikuasai perusahaan swasta domestik maupun asing," sebut legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini. ■ TIF